

Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan Dalam Menunjang Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara

Sammy Rommy Novie Korua

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia Tomohon

Penulis Korespondensi; novieko@gmail.com

Diterima: 24 Juni 2020; Disetujui : 10 Juli 2020

ABSTRACT

In the Preamble of the 1945 Constitution stated that the national development is among others to promote the general welfare and educate the life of a nation that social justice. In fact, until now the situation is still far from ideal conditions with the presence of so many Indonesians who live unfit and are below the poverty line. The problem of poverty is the issue that most attention the nation of Indonesia from time to time. Based on this, this research tries to reveal how the mechanism of revolving savings and loan funds for the Women's Lending Group in supporting poverty alleviation in Kecamatan Kauditan Kabupaten, Minahasa Utara.

The method used in this research is descriptive qualitative method. Primary data were collected through interviews, field notes, observations and other official documents that were then analyzed. Secondary data is taken from the document. The sample is determined by purposive sampling of 7 people from group members and UPK management. Data were analyzed descriptively.

Based on the result of the research, it can be concluded that the revolving fund activity in the Women's Lending can positively support poverty eradication program in Kecamatan Kauditan Minahasa Utara Regency. This can happen because it is supported by an adequate mechanism or procedure. It is suggested that there should be an extension of recipient target other than women's savings group or individual group.

Keywords : *Poverty Alleviation, Community Empowerment*

ABSTRAK

Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa pembangunan nasional adalah antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang keadilan sosial. Kenyataannya hingga saat ini situasi yang terjadi masih jauh dari kondisi ideal dengan adanya begitu banyak penduduk Indonesia yang hidup tidak layak dan berada di bawah garis kemiskinan. Persoalan kemiskinan ini menjadi persoalan yang paling menyita perhatian bangsa Indonesia dari waktu ke waktu. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan bagaimana mekanisme perguliran dana simpan pinjam bagi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan dalam menunjang pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui naskah wawancara, catatan lapangan, observasi serta dokumen resmi lainnya yang kemudian dianalisis. Data sekunder diambil dari dokumen. Sampel

ditentukan secara purposive sampling sejumlah 7 orang dari anggota kelompok dan pengurus UPK. Data dianalisis secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa kegiatan dana perguliran dalam Kelompok Simpan Pinjam Perempuan ini secara positif dapat menunjang program pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Hal ini dapat terjadi karena didukung dengan adanya mekanisme atau tata cara yang telah memadai. Disarankan perlu adanya perluasan sasaran penerima selain kelompok simpan pinjam perempuan ataupun kepada perseorangan.

Kata Kunci : Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bangsa Indonesia pada dasarnya adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang lebih maju, lebih sejahtera namun berkeadilan yang berdasarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini juga menjadi jelas sebagaimana dicantumkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pembangunan nasional adalah ditujukan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kenyataannya hingga saat ini situasi yang terjadi masih jauh dari kondisi ideal, terutama ketika kita dapat melihat baik secara kasat mata maupun dalam angka-angka ada ada begitu banyak penduduk Indonesia yang hidup tidak layak dan berada dibawah garis kemiskinan. Persoalan kemiskinan ini menjadi persoalan yang paling menyita perhatian bangsa Indonesia dan seolah-olah bagaikan suatu lingkaran setan yang tidak akan pernah putus dari waktu ke waktu.

Berdasarkan hak tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan bagaimana mekanisme yang diterapkan dalam proses perguliran dana simpan pinjam untuk Kelompok Simpan Pinjam Perempuan ini mengingat akan perannya dalam membantu mengentaskan kemiskinan terutama di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui naskah wawancara, catatan lapangan, observasi serta dokumen lainnya yang kemudian dianalisis. Data sekunder diambil dari dokumen. Sampel ditentukan secara purposive sampling sejumlah 7 orang dari anggota kelompok dan pengurus. Data dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perguliran dana simpan pinjam bagi kelompok Simpan Pinjam Perempuan di UPK Kecamatan Kauditan dilakukan dengan standard operasi dan prosedur yang telah ditetapkan. Mekanisme perguliran dana tersebut menjadi bagian dari usaha pengentasan kemiskinan dengan menitikberatkan pada sistem dana bergulir kelompok, organisasi pengelola, proses pengusulan kelompok, syarat dan ketentuan yang dipakai, proses verifikasi, mekanisme persetujuan pencairan dana, proses pencairan, proses pengelolaan dana dalam kelompok dan proses pengembalian dana.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan perguliran dana dalam kelompok Simpan Pinjam Perempuan ini secara positif dapat menunjang upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Hal ini bisa terjadi karena didukung oleh adanya mekanisme atau tata cara yang telah memadai. Disarankan perlu adanya perluasan sasaran penerima selain kelompok simpan pinjam perempuan ataupun kepada perseorangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Khusus untuk informan dari Kelompok Simpan Pinjam Perempuan diambil di Desa Watudambo Dua.

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian sehingga data yang ada tidak diwujudkan dalam bentuk angka-angka melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses dan peristiwa tertentu (Subagyo, 1991:94).

Sugiyono (2009) mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif berupaya memahami gejala sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Metode penelitian deskriptif ialah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara akurat. Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti (Moleong, 2009).

Dalam penelitian ini, peneliti lebih menfokuskan pada mekanisme perguliran dana bagi kelompok Simpan Pinjam Perempuan sebagai bagian dari usaha pengentasan kemiskinan dengan menitikberatkan pada sistem pengelolaan dana bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan, organisasi pengelola, proses pengusulan kelompok, syarat dan ketentuan yang dipakai, proses verifikasi, mekanisme persetujuan pencairan dana, proses pencairan, proses pengelolaan dana di kelompok dan proses pengembalian dana.

Informan dalam penelitian ini adalah sumberdaya manusia yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di Kecamatan Kauditan baik yang ada ditingkat Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan dan dari Kelompok SPP berjumlah 7 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Minahasa Utara yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri. Secara geografis Kabupaten Minahasa Utara terletak pada jazirah utara pulau Sulawesi. Kondisi topografi sebagian besar wilayah adalah dataran rendah bergelombang dan sebagian kecil berbukit/pegunungan yang membentang dari Utara adalah Desa Aerbanua Kecamatan Likupang Barat dan daerah paling selatan adalah Desa Makalisung Kecamatan Kema.

Kegiatan Simpan Pinjam bagi kelompok Perempuan yang merupakan warisan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebagai bagian dari implementasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun secara keseluruhan untuk Pelaku dan Tata Kerja masih digunakan.

Unit Pengelola Kegiatan ini tetap berjalan dengan tugas utama untuk mengelola dana perguliran yang tetap ada dan mengendap di tiap kecamatan dan menjadi milik dari masyarakat untuk dilanjutkan untuk dikembangkan sesuai fungsinya. Dana perguliran peninggalan dari Simpan Pinjam Perempuan PNPM-MP dikelola oleh UPK Kecamatan Kauditan dengan nama Dana Simpan Pinjam "Minawerot" dengan kegiatannya untuk mengelola keuangannya dan melakukan pelayanan pinjaman kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat khususnya kalangan perempuan.

Dalam UPK terdapat ini juga perangkat lainnya yang menjadi Pelaku yang tetap harus ada dalam melanjutkan kegiatan pengelolaan dana perguliran ini, yaitu Badan Pegawai UPK atau BP-UPK yang sesuai namanya adalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana perguliran oleh UPK, Tim Verifikasi (TV) yang sesuai dengan namanya bertugas dalam melakukan verifikasi terhadap calon penerima dana simpan pinjam baik untuk dokumen maupun kondisi nyata melalui peninjauan secara langsung ke rumah atau tempat usaha serta melakukan kegiatan wawancara, Tim Pendanaan yang bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai dokumen yang telah diproses sebelumnya untuk kemudian memutuskan apakah suatu kelompok dapat didanai atau tidak.

Dari hasil wawancara dengan para informan didapati bahwa kegiatan dana perguliran dalam Kelompok Simpan Pinjam Perempuan ini secara positif dapat menunjang program pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini didapati bahwa mekanisme yang dijalankan sebenarnya sudah memadai baik dari segi dokumentasinya, tahapan, tata cara maupun aturan-aturan yang diberlakukan.

Permasalahan sumberdaya manusia yang sempat menjadi hambatan dalam mengelola dana ini sudah berusaha diperbaiki dengan dilakukan penggantian pengurus UPK. Selain ada pengawasan dari Badan Pegawai UPK (BP-UPK), pengurus UPK berikutnya dibekali dengan kode etik yang bersifat mengikat, dimana akan disebut pelanggaran apabila melakukan hal-hal berikut :

1. Pengurus UPK menggunakan uang UPK untuk kepentingan pribadi;
2. Pengurus UPK meminjam uang dikelompok dengan mengatasnamakan orang lain;
3. Pengurus UPK meminjam uang di kelompok dan desa yang bukan tempat berdomisili pengurus UPK tersebut;
4. Pengurus UPK meminjam uang di kelompok yang dia bukan anggota kelompok tersebut;
5. Pengurus UPK tidak melakukan pencatatan atas dana setoran kelompok baik di buku Kas SPP dan Kartu Kredit serta slip setoran (bukti);

6. Pengurus UPK menerima uang transport, hadiah, kompensasi pencairan atau lainnya yang berupa uang dari kelompok dan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS, 2011. Diseminasi Hasil Studi Kuantitatif dan Kualitatif Dampak PNPM Mandiri Perdesaan. Jakarta
- BAPPENAS, 2012. Laporan Singkat Pencapaian MDG's Indonesia 2012. Jakarta.
- BAPPENAS, 2013. Evaluasi PNPM Mandiri. Jakarta.
- Cahyat, A, Gooner, C dan Michaella, H, 2007. Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga, Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat Indonesia. CIFOR, Bogor.
- Ditjen PMD Depdagri, 2006. Sejarah Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia. www.tkpcri.org.
- Ditjen PMD Depdagri, 2007. Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Jakarta.
- Ditjen PMD Depdagri, 2008. Pedoman Teknis Operasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Jakarta.
- Ditjen PMD Depdagri, 2011. Tentang PNPM Mandiri Perdesaan. www.pnpm-perdesaan.or.id
- Friedmann, J, 1979. *Urban Poverty in Latin America, Some Theoretical Considerations*, dimuat dalam : Development Dialogue, Vol.1, Upsala, Dag Hammarskjold Foundation.
- Friedmann, J, 1992. *Empowerment. The Politics of An Alternative Development*, dimuat dalam : Basil Blackwell, Oxford.
- Gapri/Oxfam, 2003. Advokasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Buku Panduan). Jakarta.
- Hamudy, MIA. 2008. Pengentasan Rakyat Miskin dan Pembangunan Manusia di Jawa Barat. Program Pascasarjana Fisip Unpad. Bandung.
- Hutomo, Y. M. 2000. Program Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi. Tim Koordinasi Pengelola Program PDM-KE, Jakarta.
- Jarnasy, O. 2004. Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan. Belantika. Jakarta.
- Kartasmita, G. 1996. Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Pustaka Cidesindo, Jakarta.

- Kartasmita, G. 1997. *Administrasi Pembangunan*. LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Khomsan, A, dkk. 2015. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Mardikanto dan Soebianto, 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Moleong, L. J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mubyarto, 1998. *Strategi Pembangunan Pedesaan*. P3PK, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Mubyarto, 2003. *Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia* Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel Th.II-No.2
- Mulandar, S. 2006. *Dekumanisasi Anak Marjinal, Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*. Yayasan Akatiga-Gugus Analisis, Bandung.
- Nasikun. 2001. *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*, Diktat Mata Kuliah Program Magister Administrasi Publik. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Prijono, O. S, dan Pranarka, A. M. W, 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijaksanaan dan Implementasi*. CSIS, Jakarta.
- Rasyid, R. 1993. *Pembangunan Pemerintahan Indonesia Memasuki Abad 21*. PT Jarsif Watapone, Jakarta.
- Richardson,W. 1996. *Ilmu Ekonomi Regional, Dasar-Dasar*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sahdan, G, 2004. *Kemiskinan Desa, Menanggulangi Kemiskinan Desa*. Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”, Yogyakarta.
- Sekretariat Nasional PNPM, 2008. *Simpan Pinjam Perempuan*. www.pnpm-perdesaan.org.
- Siagian, H. H. 2001. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Haji Mas Agung, Jakarta.
- Steer, AD, 2006. *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Ikhtisar, Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Kawasan Asia Timur dan Pasifik. Penerbit Gradasi Aksara, Jakarta.
- Stepanek, JF, 1985. *Kemiskinan, Pemerintah Memaparkan Program Penanggulangan Kemiskinan*. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia Jakarta.
- Sudarmanto, D, 2004. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Belajar Keaksaraan Fungsional*. Artikel, www.bppnfi-reg4.net/index.php/pemberdayaan-perempuan.html.

- Sugiyono, 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. CV Alfabeta. Bandung.
- Sumidiningrat, G. 2006. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, Bina Renariwara, Jakarta.
- Suparlan, P. 1995. Penyunting : Kemiskinan Di Perkotaan, Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan.. Penerbit Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Taruna, JC. 2001, Pendidikan Non-formal Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat. Makalah disampaikan pada pertemuan tahunan IV SPPM, Solo, 25–28 September 2001. dapat dilacak pada www.balaidesa.or.id/tukiman.htm
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2012. Satu Setengah Juta Orang Keluar dari Kemiskinan. www.tnp2k.wapresri.go.id